

# ANCAMAN TRADISIONAL DI DEPAN WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS : LAUT TIONGKOK SELATAN)

## TRADITIONAL THREATS IN FRONT OF INDONESIAN REGION (CASE STUDY: SOUTH CHINA SEA)

Ida Bagus Aditya Wicaksana<sup>1</sup>

Program Studi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

(adityawicaksana@hotmail.com)

**Abstrak** -- Saat ini Indonesia berada dalam posisi terjepit dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Tidak terlibatnya Indonesia dalam konflik tersebut bukan berarti Indonesia lepas dari bahaya konflik kepentingan maupun perang yang dapat terjadi karena sengketa wilayah tersebut. Tiongkok sebagai salah satu negara terkuat di dunia menjadi semakin agresif seiring dengan meningkatnya kapabilitas militernya. Kondisi ini semakin diperburuk dengan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan yang mencakup wilayah Malaysia, Brunei, Vietnam, dan juga Filipina atas dasar historis. Selain pihak-pihak yang bertikai, Amerika Serikat juga tampak berupaya melakukan intervensi terhadap konflik-konflik yang dihadapi oleh Tiongkok. Seperti pada kasus sengketa Kepulauan Senkaku dengan Jepang, Amerika ikut melakukan intervensi dengan cara membantu Jepang dalam kerja sama militernya untuk menghadapi Tiongkok. Begitu juga dalam kasus Laut Tiongkok Selatan ini, Amerika menggunakan alasan kebebasan bernavigasi untuk mencegah klaim Tiongkok menjadi kenyataan di salah satu jalur pelayaran terpadat di Asia. Ini yang dimaksudkan dengan posisi terjepit Indonesia. Berada persis di batas garis konflik bukan berarti keamanan Indonesia terjamin. Dengan adanya dua kekuatan adidaya dunia yakni Amerika Serikat dengan Tiongkok serta beberapa negara anggota ASEAN yang berkonflik Indonesia mengalami suatu dilema di mana banyaknya kepentingan politik, ekonomi hingga kepentingan pertahanan Indonesia dapat terganggu dengan adanya konflik ini. Baik dari kondisi realita hingga skenario peperangan yang dapat muncul karena *Code of Conduct* sampai saat ini tidak terselesaikan, posisi pertahanan Indonesia saat ini sedang tidak dalam posisi yang menguntungkan.

**Kata kunci:** Sengketa, pertahanan, skenario perang, asean, tiongkok, amerika serikat, politik, militer.

**Abstract** -- Indonesia is currently in a pinned position in the South China Sea conflict. The absence of Indonesia's involvement in the conflict does not mean that Indonesia is free from any danger of conflict of interest or war that may occur due to the dispute of the territory. China as one of the strongest countries in the world becomes more aggressive as its military capability increases. This condition is further exacerbated by China's claim to the South China Sea covering Malaysia, Brunei, Vietnam and the Philippines on a historical basis. In addition to the conflicting parties, the United States also appears to be seeking to intervene in the conflicts faced by China. As in the case of the Senkaku Islands dispute with Japan, the Americans participated in intervening by helping Japan in its military cooperation to confront China. Likewise in the case of the South China Sea, Americans use the reason for the freedom of navigation to prevent Chinese claims from

---

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

becoming reality in one of Asia's most populous shipping lanes. This is what is meant by Indonesia's pinched position. Being right on the boundary of the conflict does not mean that Indonesia's security is guaranteed. With the two world superpowers namely the United States with China and several ASEAN member states in conflict Indonesia experienced a dilemma in which many political interests, economic up to the interests of Indonesian defense can be disrupted by this conflict. Both from the condition of reality to the scenario of war that can arise because the Code of Conduct to date has not been resolved, Indonesia's defense position is currently not in a favorable position.

**Keywords: Disputes, defense, war scenarios, asean, china, united states, politics, military.**

## Pendahuluan

Dalam buku Doktrin Pertahanan Negara tahun 2013 maupun Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 menjelaskan bentuk dua ancaman bagi keutuhan Indonesia. Ancaman tersebut berupa ancaman militer dan nir-militer. Pada masa kini, ancaman militer bagi Indonesia di tengah kerjasama global yang terus dibangun oleh bangsa ini terasa sangat kecil kemungkinannya. Tetapi dengan hadirnya ancaman dalam bentuk nir-militer yang semakin besar seperti konflik politik dalam penentuan batas antar negara maupun kepentingan ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar negara dapat mendorong setiap negara ke arah konflik terbuka yang berarti ancaman militer tidak dalam posisi nihil. Ancaman tradisional seperti agresi militer bukan tidak mungkin terjadi ditengah kondisi saat ini. Kondisi lingkungan strategis Indonesia saat ini berada di antara dua kekuatan global yaitu Amerika

Serikat dan Tiongkok yang sedang bangkit menuju negara maju. Kedua negara menerapkan kebijakan untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Tanda-tanda konflik terbuka pun mulai bermunculan baik itu antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN (Association of South East Asia Nations)<sup>2</sup> dan konflik politik yang meningkatkan tensi hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat menyangkut masalah Laut Tiongkok Selatan.<sup>3</sup> Dalam teori Realisme dijelaskan bahwa negara memiliki kecenderungan untuk mengejar kekuatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>4</sup> Perebutan kekuatan ini seringkali menimbulkan konflik dalam dunia internasional seperti

---

<sup>2</sup> Beina Xu, *South China Sea Tension*, Council on Foreign Relations, <http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790>, diakses 28 Desember 2014.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Robert Jackson & Sorensen, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press, Inc., 1999.

pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II.<sup>5</sup> Dan fakta menunjukkan bahwa kedua perang tersebut didasari pada kepentingan politik dan ekonomi yang kemudian mendorong peperangan tersebut terjadi. Dengan melihat pada kondisi lingkungan strategis tersebut, kedaulatan Indonesia bukan tanpa ancaman baik itu dari politik, ekonomi, hingga militer yang dapat datang setiap waktu. Kedaulatan bagi negara manapun di dunia ini merupakan suatu harga mati untuk dipertahankan. Pada pemikiran realisme, negara memiliki kepentingan nasional yang sangat vital yaitu menjaga kedaulatan wilayahnya. Untuk itu sistem pertahanan selalu menjadi komponen strategis bagi sebuah negara. Ada tidaknya suatu konflik tidak akan berpengaruh kepada pengembangan sistem pertahanan yang dimiliki. Sampai saat ini segala bentuk taktik dan strategi negara dalam mencapai kepentingan nasional negara pada praktiknya juga menggunakan kekuatan militer di lapangan.<sup>6</sup> Karena konflik politik, ekonomi ataupun geografis dapat

berkembang menjadi konflik terbuka antar negara.

### **Kondisi Lingkungan Strategis Asia Tenggara**

Dalam membicarakan kondisi lingkungan strategis Asia Tenggara tidak dapat lepas dari masalah politik terkini yang sedang terjadi di kawasan yaitu sengketa Laut Tiongkok Selatan. Saat ini Indonesia dengan ASEAN berupaya untuk menghasilkan *Code of Conduct* (CoC) sebagai pedoman dalam melintas di wilayah sengketa untuk mencegah timbulnya persinggungan antara kapal-kapal perang masing-masing negara.<sup>7</sup> Tetapi sampai dengan saat ini CoC tersebut belum juga dapat diselesaikan. Dengan tidak adanya pedoman di wilayah sengketa, dialog atau diplomasi antar negara menjadi jalan satu-satunya untuk menengahi pihak-pihak yang berkonflik. Dari sisi politik, Indonesia berupaya menggunakan strategi diplomasi dalam menekan tensi yang terus meningkat di kawasan. Kebijakan “*thousand friends zero enemy*” yang ditetapkan oleh Presiden Yudhoyono terdahulu terus diterapkan sampai masa jabatannya berakhir dengan tidak memihak baik

---

<sup>5</sup> P.K. Ojong, *Perang Eropa Jilid I*, Kompas, 2005, Jakarta.

<sup>6</sup> Carl Von Clausewitz, *On War*, Ed by Michael Howard and Peter Paret, Princeton University Press, 1987.

---

<sup>7</sup> Carlyle A. Thayer, *Indonesia's Efforts to Forge ASEAN Unity on Code of Conduct*, CSIS, 2013.

Tiongkok, negara ASEAN yang berkonflik maupun Amerika Serikat. Naiknya presiden baru Indonesia Joko Widodo, belum terlihat adanya pernyataan baru tentang kebijakan Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain, tetapi Indonesia tetap berpegangan pada prinsip politik bebas aktif yang terus diterapkan sampai saat ini. Walaupun demikian, Amerika Serikat terus berupaya mendekati negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam upayanya membendung langkah Tiongkok menjadi negara dengan kekuatan dan pengaruh besar di Asia Pasifik.<sup>8</sup> Contohnya dapat terlihat pada bantuan persenjataan Amerika kepada Filipina dan Vietnam.<sup>9</sup> Amerika bahkan mengadakan latihan militer bersama dengan Vietnam dan tindakan ini cukup meningkatkan tensi di wilayah sengketa kemudian.<sup>10</sup> Indonesia juga tidak lepas dari kebijakan Amerika Serikat yaitu “Asia Pivot” di mana

Amerika akan mengkonsentrasikan kekuatannya di wilayah Asia dengan alasan bahwa Asia saat ini menjadi pusat pertumbuhan dunia.<sup>11</sup> Indonesia ikut menjadi negara yang berupaya didekati kembali oleh Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya dukungan pada kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia baik pada masa Yudhoyono dan Joko Widodo seperti pengembangan kekuatan maritim Indonesia.<sup>12</sup> Dan hal lain pada masa pemerintahan Yudhoyono yang cukup memperlihatkan upaya Amerika dalam pendekatan hubungan dengan Indonesia sejak memanasnya Laut Tiongkok Selatan adalah rencana hibah satu skadron F-16 tipe C/D kepada Indonesia.<sup>13</sup> Kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya mencerminkan sikap Amerika yang berupaya untuk merangkul Indonesia dalam membendung pengaruh dan kekuatan Tiongkok di kawasan. Pada satu sisi mendekatnya kembali Amerika

---

<sup>8</sup>Alexander R. Vulling, *Vietnam, US, and Japan in South China Sea*, *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2014/11/vietnam-the-us-and-japan-in-the-south-china-sea/>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>9</sup> US to Partially Lift Vietnam Arms Embargo, *BBC News US& Canada*, <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29469719>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>10</sup>Carl Thayer, *Vietnam Mulling New Strategy to Deter China*, *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2014/05/vietnam-mulling-new-strategies-to-deter-china>, diakses 29 Desember 2014.

---

<sup>11</sup>*The Obama Administration Pivot to Asia*, *The Foreign Policy Initiative*, <http://www.foreignpolicy.org/content/obama-administrations-pivot-asia>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>12</sup>Adelle Neary, *Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus"*, *CSIS*, <http://csis.org/publication/jokowi-spells-out-vision-indonesias-global-maritime-nexus>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>13</sup>Jim Wolf, *US Moves to Arms Indonesia's Growing F-16 Fighter Fleet*, *Reuters*, <http://www.reuters.com/article/2012/08/25/usa-indonesia-arms-idUSL2E8JOGMO20120825>, diakses 29 Desember 2014.

Serikat kepada Indonesia merupakan suatu keuntungan politik yang dapat dimanfaatkan tetapi di sisi lain dengan kondisi yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan hal tersebut bukan merupakan peluang terbaik saat ini untuk Indonesia dalam mencapai kepentingan-kepentingan nasional Indonesia.

Walaupun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, tetapi wilayah yang disengketakan tepat berbatasan dengan perairan Natuna yang juga merupakan salah satu batas wilayah perairan Indonesia. Perairan Natuna bukan hanya bernilai sebagai pulau perbatasan bagi Indonesia, tetapi wilayah tersebut juga merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alamnya berupa gas alam dan minyak mentah.<sup>14</sup> Kondisi ini juga diketahui oleh negara-negara lain. Banyaknya negara yang ikut berpartisipasi dalam mengolah sumber daya minyak dan gas di perairan Natuna menjadi bukti bahwa perairan Natuna merupakan lahan subur untuk mendapatkan keuntungan bagi negara-negara di dunia. Melihat hal

tersebut bukan berarti Tiongkok juga tidak melirik kepada perairan yang kaya tersebut. Pada pertengahan tahun 2014 hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia memanas dikarenakan peta pada buku paspor Tiongkok mencakup wilayah perairan Natuna.<sup>15</sup> Tetapi kemudian berita tersebut menghilang setelah terdapat klarifikasi terakhir baik dari pihak Tiongkok maupun pihak Indonesia. Walaupun demikian, hal ini juga dapat menjadi pertanyaan bagi semua pihak. Mengapa Tiongkok tidak mengklaim batas wilayah perairannya sampai dengan wilayah Indonesia? Apakah hanya karena batas klaim laut yang ditentukan berdasarkan jarak dari daratan tidak sampai atau dasar historis Tiongkok tidak sampai pada wilayah tersebut? Padahal Natuna memiliki cadangan minyak dan gas yang besar jumlahnya. Kemudian pada pertanyaan kedua adalah Apakah Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi di mata Tiongkok karena merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kekuatan militer yang cukup disegani atau karena kedekatan hubungan ekonomi di antara

---

<sup>14</sup> Masykur A. Baddal, *Masuknya Wilayah Natuna Dalam Paspor Baru China, Proyek China Raya Semakin Dekat?*, Kompasiana, <http://hankam.kompasiana.com/2014/10/16/masuknya-wilayah-natuna-dalam-paspor-terbaru-china-proyek-china-raya-semakin-dekat-680832.html>, diakses 29 Desember 2014.

---

<sup>15</sup> Evy R. Syamsir, *China Klaim Wilayah Natuna, Antara* News, <http://www.antaranews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna>, diakses 28 Desember 2014.

kedua negara sehingga Tiongkok lebih memilih menghindari konflik dengan Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tidak akan diberikan jawabannya oleh Tiongkok. Melihat pada fakta di mana Tiongkok berupaya mengklaim kembali Laut Tiongkok Selatan menjadi wilayah kedaulatannya selain karena faktor jalur lintas laut strategis tetapi juga karena cadangan gas alam yang dikandung sangat besar. Ini berarti Indonesia tetap harus mempersiapkan diri entah berapa tahun lagi apabila CoC tidak berhasil dan posisi Indonesia melemah maka Natuna dapat menjadi sasaran klaim Tiongkok merujuk pada kecenderungan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

### **Kondisi Pertahanan Indonesia di Sekitar Wilayah Konflik**

Pada sektor pertahanan berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan, pada tahun 2014 TNI (Tentara Nasional Indonesia) terus mengupayakan tercapainya *minimum essential forces* pada tahun 2024 nanti. Pada tahun ini TNI AU (Angkatan Udara) telah mendatangkan beberapa tambahan pesawat Sukhoi SU27/30 untuk menambah kekuatan TNI AU. Hanya saja

penempatan Sukhoi tersebut tidak berdekatan dengan wilayah perairan Natuna yang memiliki potensi konflik sangat besar melainkan ditempatkan di Lanud Hasanuddin, Makassar sebagai Skadron Udara 11.<sup>16</sup> Sementara Pangkalan Udara terdekat dari wilayah sengketa adalah Supadio di Pontianak yang diperkuat dengan Skadron Udara 1.<sup>17</sup> Skadron Udara 1 hanya menggunakan pesawat tempur ringan Hawk 200 untuk melakukan operasinya menjaga kedaulatan Indonesia. Sementara pesawat tempur andalan Indonesia lainnya yaitu F-16 tipe A/B berposisi di lanud Madiun sebagai Skadron Udara 3 dan di Pekanbaru sebagai Skadron Udara 16.<sup>18</sup> Melihat posisi penempatan skadron udara dan juga kemampuan pesawat yang ditempatkan, posisi Skadron Udara 16 memiliki peran vital karena letaknya di Pekanbaru dan berisikan pesawat tempur yang layak untuk melakukan pertahanan udara dibandingkan hanya mengandalkan

---

<sup>16</sup> Lanud Hasanuddin, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, <http://tni-au.mil.id/content/lanud-hasanuddin-o>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>17</sup> TNI AU Lanud Supadio, Skadron Udara 1, <http://lanud-supadio.mil.id/divisi/skadron-udara-1/>, diakses 28 Desember 2014.

<sup>18</sup> F.B. Anggoro, Skadron Udara Baru F-16 Blok 25 di Pekanbaru Operasional Juni, Antara News, <http://www.antarane.ws.com/berita/421130/skadron-udara-baru-f-16-blok-25-di-pekanbaru-operasional-juni>, diakses 28 Desember 2014.

pesawat tempur ringan baik untuk memberikan *deterrence effect* maupun melaksanakan operasi pertahanan udara sebagaimana tugas dari TNI AU.

Peran TNI AL (Angkatan Laut) juga menjadi sangat vital ketika titik rawan konflik berada di wilayah perairan. Saat ini TNI AL memiliki dua armada masing-masing yaitu Armada Barat (Armabar) yang berpangkalan di Jakarta dan Armada Timur (Armatim) yang berpangkalan di Surabaya.<sup>19</sup> Dengan masalah yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, maka menjadi bagian dari tugas Armabar untuk ikut mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dari ancaman yang datang dari wilayah tersebut. Sementara pangkalan AL terdekat dari wilayah sengketa adalah Pangkalan AL (Lanal) di Pontianak. Hanya saja berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber di Lanal Pontianak yang diwakili oleh Mayor Laut Niko, Mayor Laut Nanang, dan Mayor Laut M. Homsin untuk membahas ancaman di perbatasan, AL membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk mencapai kepulauan Natuna yang ada di perbatasan.<sup>20</sup> Dengan waktu

tersebut tentu tidak efektif untuk menangkal suatu serangan dari Utara perairan Natuna. Selain itu, kendala utama TNI AL dalam melakukan operasi adalah masalah anggaran untuk bahan bakar. Dengan jumlah KRI yang terbatas dan juga BBM yang terbatas, maka operasi pengamanan laut yang dilakukan menjadi tidak efektif.<sup>21</sup>

Dari TNI AD (Angkatan Darat), walaupun tidak terlibat langsung wilayah tugasnya dengan wilayah konflik yang ada, tetapi TNI AD tetap berfungsi menjadi kekuatan pendukung untuk mempertahankan wilayah daratan terdekat seperti Kalimantan. KODAM Tanjung Pura yang berlokasi di Pontianak menjadi pangkalan utama bagi TNI AD yang memiliki posisi terdekat dengan zona konflik. Walaupun peran TNI AD dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan ini tidak dominan seperti AU atau AL tetapi peran TNI AD tidak dapat dikesampingkan. Karena AD merupakan pertahanan terakhir Indonesia dalam mempertahankan wilayah darat Indonesia. Dalam posisinya TNI AD diharapkan dapat mempertahankan

---

<sup>19</sup>Koarmabar TNI AL, <http://koarmabar.tnial.mil.id/>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>20</sup>Wawancara dengan beberapa Mayor Laut diantaranya Mayor Laut Niko, Mayor Laut Nanang, dan Mayor Laut M. Homsin di Lanal Pontianak, dalam rangka KKDN Universitas Pertahanan Indonesia, 23 Desember 2014.

---

<sup>21</sup> *Patroli Armatim Terkendala Pasokan BBM*, Sinar Harapan.CO, <http://sinarharapan.co/news/read/141217002/patrol-armatim-terkendala-pasokan-bbm>, diakses 29 Desember 2014.

wilayah kedaulatan Indonesia di darat apabila wilayah laut dan udara khususnya di zona konflik telah ditembus oleh pasukan musuh.

### **Teori**

Dalam menganalisa ancaman tradisional yang akan datang terhadap Indonesia, penulis menggunakan Teori Realisme sebagai dasar teori utama dan dengan teori turunannya seperti “*balance of power*”, “*deterrence effect*”, “*power*”, “*security dilemma*” dan “*national interest*” atau kepentingan nasional.<sup>22</sup> Pada teori Realis, setiap negara selalu mengincar *power* dalam upayanya untuk memenuhi *national interest* nya. Tetapi pada kenyataannya tidak mudah untuk mendapatkan *power* tersebut. Dalam dunia internasional, setiap negara memiliki perasaan curiga dengan negara lainnya. Ketika suatu negara meningkatkan kekuatannya maka negara lain akan merasa curiga sehingga ikut meningkatkan kekuatannya karena merasa *security dilemma*. Ini yang dimaksud oleh pemikir-pemikir realis yang beranggapan bahwa perdamaian akan tercipta apabila distribusi kekuatan dapat

terbagi secara merata atau terciptanya *balance of power* di antara dua negara atau lebih.<sup>23</sup> Selain teori realis, setidaknya ada satu pandangan yang coba dijadikan bahan acuan dalam analisa kasus ini yaitu pandangan Vasquez dan Henehan dalam bukunya yang berjudul *Territory, War, and Peace* dijelaskan bahwa suatu negara yang bertetangga memiliki kemungkinan untuk berperang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara yang tidak bertetangga.<sup>24</sup>

Kondisi politik dengan mencari aliansi merupakan sifat dasar dari teori realis itu sendiri. Pemikir-pemikir realis percaya bahwa dengan adanya keseimbangan kekuatan atau dikenal dengan istilah *balance of power* maka peperangan akan dapat dicegah. Hal ini dikarenakan dengan posisi seimbang maka akan menghasilkan “*zero sum game*” atau dapat diartikan tidak ada pihak yang menang atau kalah dan hanya ada kerugian di kedua belah pihak. Tetapi hal ini dapat berubah apabila keinginan untuk mendapatkan *power* jauh lebih tinggi sehingga mendorong pemimpin negara untuk memilih jalan perang untuk mendapatkannya. Berdasarkan fakta

---

<sup>22</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, (MA : Allyn & Bacon, 1999).

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> John Vasquez and Marie T. Henehan, *Territory, War, and Peace*, Routledge, (Oxon: Routledge, 2011).

yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia ke II, negara-negara yang berperang pada kedua perang besar tersebut pada awalnya terlibat konflik politik dan ekonomi. Perang Dunia I lebih didasari pada persaingan dagang serta proteksi ekonomi antar negara yang kemudian menggunakan alasan terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand untuk menyatakan perang.<sup>25</sup> Sementara Perang Dunia ke II lebih pada keinginan Jerman untuk meraih *power* di seluruh daratan Eropa. Melihat pada sejarah yang ada, maka ada baiknya kejadian tersebut menjadi peringatan untuk tetap selalu waspada karena perang dapat terjadi suatu waktu dan menimbulkan kerugian yang sangat besar tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi semua negara.

### **Analisa Ancaman Terhadap Indonesia**

Dalam kaitannya dengan kasus yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, penulis melakukan analisa berdasarkan kasus yang terjadi serta teori realisme yang digunakan. Seperti yang diketahui kondisi politik di antara negara yang bersengketa saat ini cukup tinggi. Di tambah lagi dengan masuknya Amerika Serikat yang terus menekankan adanya kebebasan

---

<sup>25</sup> 100 Tahun Perang Dunia Pertama, Kompas 10 Agustus 2014.

bernavigasi di Laut Tiongkok Selatan sebagai kepentingannya ikut memanaskan situasi. Indoensia saat ini berupaya menengahi konflik yang terjadi dengan berupaya membentuk CoC. Tetapi sampai dengan saat ini CoC yang diharapkan dapat menjadi pedoman di Laut Tiongkok Selatan belum kunjung selesai.<sup>26</sup> Ini berarti potensi konflik terbuka menjadi sangat besar.

Dari sisi Amerika Serikat, negara adidaya ini terus berupaya mencari aliansi untuk membendung kemajuan Tiongkok di kawasan. Sudah menjadi kebijakan Amerika untuk berfokus pada wilayah Asia semenjak Tiongkok terus meningkatkan kapabilitas militernya serta kebijakannya untuk menjadi *blue water navy*.<sup>27</sup> Aliansi dalam teori realis merupakan salah satu upaya kerja sama untuk membangun kekuatan yang lebih besar lagi dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia juga tidak lepas dari upaya Amerika untuk membangun aliansi di Asia Tenggara untuk membendung pengaruh Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan upaya Amerika

---

<sup>26</sup> Carlyle A. Thayer, *Indonesia's Efforts to Forge ASEAN Unity on Code of Conduct*, CSIS, 2013.

<sup>27</sup> The Diplomat, *China's Real Blue Water Navy*, <http://thediplomat.com/2011/08/30/chinas-not-so-scary-navy/comment-page-2/?all=true>, diakses 29 Desember 2014.

memberikan hibah F-16 tipe C/D kepada Indonesia yang menjadi wacana pada pertengahan tahun 2014.<sup>28</sup> Di satu sisi hal ini memang merupakan keuntungan bagi Indonesia. Tetapi bagi Tiongkok hal ini dapat dilihat sebagai haluan Indonesia untuk memilih Amerika Serikat sebagai aliansi dibandingkan dengan mendekati diri pada Tiongkok. Analisa yang dapat diperkirakan kemudian adalah Tiongkok tentu akan bertindak lebih agresif terhadap Indonesia yang terlihat lebih berpihak pada negara barat. Ditambah lagi, kekuatan *PLAN* (*People Liberation Army Navy*) jauh melebihi kekuatan TNI AL baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<sup>29</sup> Dan saat ini *PLAN* tengah mengoperasikan sebuah kapal induk yang cukup memberikan *deterrence effect* di kawasan Asia Tenggara.<sup>30</sup> Dengan hadirnya kekuatan yang jauh lebih besar tentu posisi tawar Indonesia tidak banyak.

Dari sisi Tiongkok, semenjak Tiongkok meningkatkan kapabilitas militernya, Tiongkok juga memberlakukan

perubahan kebijakan pertahanan dari *defense* menjadi *Active Defense*.<sup>31</sup> Ini menyebabkan Tiongkok terus bersikap agresif di perairan yang disengketakan karena beralasan membela wilayahnya dari ancaman negara-negara yang ikut bersengketa lainnya. Tiongkok mengirimkan beberapa kapal patroli untuk mengawasi wilayah sengketa begitu juga dengan Filipina dan Vietnam.<sup>32</sup> Walaupun Indonesia tidak terlibat di sana, tetapi dampak yang akan di bawa oleh negara yang bersengketa apabila sampai terjadi perang terbuka sangat buruk terhadap Indonesia. Jalur laut di wilayah tersebut merupakan jalur laut internasional dan juga digunakan oleh Indonesia untuk ekspor-impor baik ke dan dari wilayah Asia Timur serta negara ASEAN lainnya. Skenario di atas saat ini sudah terjadi dan akan bertambah buruk apabila terdapat skenario lainnya seperti penggunaan wilayah perairan Indonesia untuk mendukung jalannya peperangan. Apabila Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang berada di antara Pulau

---

<sup>28</sup> Jim Wolf, *US Moves to Arms Indonesia's Growing F-16 Fighter Fleet*, Reuters, <http://www.reuters.com/article/2012/08/25/usa-indonesia-arms-idUSL2E8JOGMO20120825>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>29</sup> The Military Balance 2011, chapter six : Asia. Pdf

<sup>30</sup> CNN, *China Lands First Jet on Aircraft Carrier*, <http://edition.cnn.com/2011/11/25/world/asia/china-aircraft-carrier-landing/>, diakses 29 Desember 2014.

---

<sup>31</sup> *National Defense Paper 2006*, Information Office of the State Council of The People's Republic of China, 2006. Beijing.

<sup>32</sup> Dan Parsons, *South China Sea Dispute Shaping Up as Coast Guard Showdown*, National Defense Magazine, <http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/June/Pages/SouthChinaSeaDisputeShapingUpasCoastGuardShowdown.aspx>, diakses 29 Desember 2014.

Kalimantan dengan Kepulauan Riau digunakan untuk lalu lintas persenjataan perang, maka Indonesia memasuki suatu konflik yang sangat besar dampaknya. Kondisi ini bukan tanpa dasar fakta yang ada. Sebelumnya Amerika Serikat dengan Armada ke-7 nya bahkan melintasi wilayah perairan Indonesia tanpa izin di sebelah utara Pulau Bawean yang kemudian terjadi insiden F-16 TNI AU dikunci sasaran oleh F-18 Amerika.<sup>33</sup> Amerika tidak pernah mengakui adanya UNCLOS yang berisi aturan mengenai negara kepulauan.<sup>34</sup> Untuk Amerika kebebasan bernavigasi adalah hak mereka. Apabila kemudian skenario ini terjadi maka tidak tertutup kemungkinan wilayah kedaulatan Indonesia akan menjadi wilayah konflik bersenjata antar negara kemudian. Dan apakah TNI hanya akan tinggal diam menyaksikan wilayah kedaulatan Indonesia digunakan oleh negara lain sebagai medan pertempuran? Tentunya hal ini akan meyeret Indonesia

---

<sup>33</sup> *Pencegatan Pesawat Pernah Terjadi di Makassar dan Bawean*, Tempo Politik, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/08/078375941/Pencegatan-Pesawat-Pernah-Terjadi-di-Makassar-dan-Bawean>, diakses 29 Desember 2014.

<sup>34</sup> *Chronological List of Ratifications, Accessions and Successions to the Convention and the Related Agreement as at 3 October 2014*, Oceans and Law of The Sea United Nations, [http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm), diakses 29 Desember 2014.

ke dalam pertempuran skala besar untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi semua orang apakah Indonesia siap untuk bertempur ketika semua sumber daya dibutuhkan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia nanti?

Aliansi yang coba dibangun Amerika saat ini tidak menguntungkan Indonesia dan hal tersebut hanya akan semakin mendekatkan Tiongkok sebagai ancaman baru bagi Indonesia dan bukan kawan di kawasan Asia Pasifik. Sementara mendekatkan diri kepada Tiongkok untuk menjalin aliansi dengan alasan agar Natuna jauh dari klaim Tiongkok juga tidak akan membawa dampak yang baik pada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Terlebih lagi hal tersebut akan membawa dampak yang sangat buruk pada Organisasi ASEAN yang sebagian negaranya tengah berkonflik dengan Tiongkok. Sementara jalan tengah yang dirintis Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN sejak konflik ini muncul kepermukaan merupakan salah satu keputusan yang tepat. Hal ini selain dapat menghambat terjadinya konflik di kawasan, Indonesia juga dapat membina hubungan baik dengan dua negara adidaya serta negara-negara ASEAN di kawasan. Tetapi Indonesia tidak dapat

terus berjalan di jalan tengah tanpa membangun kekuatannya dengan tujuan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai pemimpin ASEAN di depan Tiongkok untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di Laut Tiongkok Selatan.

Selain faktor politik dan geografis yang dapat mendorong Indonesia ke dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan, faktor ekonomi juga dapat menyebabkan Indonesia masuk ke zona konflik tersebut. Faktor ekonomi yang paling memungkinkan menjadi penyebabnya adalah posisi Natuna yang kaya akan sumber daya alam baik migas maupun ikannya. Letak Natuna yang bersebelahan dengan klaim tumpang tindih Tiongkok dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat berpotensi menjadi wilayah yang juga di klaim oleh masing-masing pihak. Wilayah perairan Natuna sudah tentu menjadi wilayah incaran apabila sampai pecah konflik di Laut Tiongkok Selatan. Dengan sumber daya migasnya Natuna berpotensi untuk mendukung keperluan logistik bagi peralatan-peralatan perang pihak yang bertikai. Walaupun saat ini Tiongkok tidak ikut mengklaim Natuna tetapi apabila posisi tawar Indonesia lemah di pandangan Tiongkok bukan

tidak mungkin Tiongkok akan berani mengklaim wilayah Natuna.

### **Rekomendasi**

Setelah melihat analisa ancaman seperti apa yang dapat terjadi terhadap Indonesia dan dekatnya posisi wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan serta potensi Natuna yang juga dapat mendorong Indonesia memasuki konflik tersebut penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi. Hal pertama adalah dengan melihat skenario terburuk yang dapat terjadi di lapangan adalah konflik yang pecah dan Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung harus terjun ke dalam konflik tersebut. Apabila skenario ini terjadi maka ancaman tradisional dalam wujud agresi militer dapat terjadi terhadap Indonesia. Dengan posisi Indonesia saat ini yang berupaya menengahi konflik tentu tidak memiliki aliansi sama sekali dengan negara manapun. Sehingga jalan satu-satunya bagi Indonesia adalah dengan memperkuat kekuatan militer Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan juga pemberdayaan komponen utama, cadangan hingga pendukung. Tidak hanya segi militer, tetapi seluruh sumber daya yang dapat digunakan untuk

keperluan peperangan harus dapat digunakan seefektif mungkin.

TNI sebagai komponen utama akan bergerak sebagai lapisan terdepan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman agresi negara lain. Pada TNI AU, dengan posisi penempatan pesawat tempur serta pangkalan saat ini maka Skadron Udara 16 akan menjadi tumpuan utama dalam mengamankan wilayah udara di atas Kepulauan Natuna yang berpotensi menjadi pintu gerbang masuknya pasukan asing. Hal ini juga berdasarkan pada pertimbangan kekuatan pesawat tempur tentara asing yang berpotensi menjadi lawan konflik Indonesia apabila terlibat dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Tetapi tugas menjadi cukup berat karena Skadron Udara 16 mengemban tugas untuk menjaga wilayah barat Indonesia yang mencakup Selat Malaka dan seluruh wilayah Sumatera. Akan lebih baik apabila terdapat satu skadron pesawat tempur generasi 4 dengan kemampuan sama atau lebih seperti milik lawan berpangkalan di Pontianak. Atau alternatif lain adalah mempercepat pembangunan bandara Liku di utara Pontianak dan juga meningkatkan tipe dari rencana awal C menjadi tipe B agar dapat ditempati oleh satu skadron

udara.<sup>35</sup> Posisi penempatan serta jenis pesawat tempur yang ditempatkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan apabila pasukan musuh telah lebih dahulu memasuki ruang udara Indonesia serta dapat memberikan *deterrence effect* terhadap lawan konflik sehingga mempertimbangkan kembali rencana untuk melakukan agresi ke wilayah Indonesia. Apabila rekomendasi di atas tidak memungkinkan baik itu karena masalah dana ataupun pertimbangan lainnya, maka penempatan posisi saat ini baik itu Skadron Udara 1 dan 16 harus diperkuat baik itu dari segi kualitas senjata maupun kuantitas persenjataannya.

TNI AL dalam kondisi ini memiliki peran yang sangat vital karena wilayah sengketa merupakan perairan. Dalam kondisi ini penulis mempertimbangkan kemungkinan peningkatan kekuatan dengan mempercepat rencana pembangunan pangkalan di sebelah utara Pontianak dekat dengan Kabupaten Sambas. Dengan posisi pangkalan utama saat berada di Pontianak, maka jarak pengerahan KRI ke wilayah konflik di perairan Natuna memerlukan waktu yang

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Komandan Lanud Supadio Kolonel Tedi Rizalihadi, dalam rangka KKDN Universitas Pertahanan Indonesia, 23 Desember 2014.

cukup panjang. Dan sudah tentu dalam kebutuhan logistik akan cukup menyulitkan karena harus kembali ke pangkalan di Pontianak. Maka dari itu untuk menciptakan kondisi yang efektif tidak ada jalan lain selain mempercepat rencana pembangunan pangkalan AL lebih dekat ke arah perbatasan atau perairan Natuna. Selain pembangunan lanal baru di Utara Pontianak, peningkatan pangkalan kecil di Natuna juga akan membantu peran TNI AL dalam melaksanakan operasi lebih maksimal.

Melihat peran AL dan AU yang cukup vital, TNI AD juga memiliki peran vital sebagai titik tumpu pertahanan darat untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Penempatan peralatan tempur AD di beberapa titik di dekat perbatasan akan semakin memantapkan pertahanan Indonesia. Memang nantinya tentu akan timbul pertanyaan dari negara tetangga, tetapi dengan alasan intensitas konflik yang tinggi dan diplomasi dengan negara tetangga penempatan persenjataan utama seperti MBT Leopard di perbatasan bukan merupakan pilhan yang salah. Selain itu penambahan jumlah prajurit yang tersebar di perbatasan juga dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan apabila skenario konflik terbuka terjadi.

Komponen utama di atas nantinya bukan hanya menjadi satu-satunya komponen yang akan berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia apabila terjadi skenario konflik di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia yang menganut strategi Perang Semesta harus dapat menggunakan seluruh komponen yang ada dengan efektif dan efisien. Komponen cadangan sudah tentu akan ikut bergerak dengan komponen utama karena tugas utama dari komponen cadangan sendiri adalah membantu tugas komponen utama serta menambah kekuatan dari komponen utama itu sendiri. Saat ini komponen cadangan Indonesia belum sepenuhnya dibangun dan dibina. Komponen cadangan di Indonesia masih terhambat pada titik rancangan undang-undang. Padahal dengan strategi perang semesta, komponen cadangan merupakan alat utama dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Pemberdayaan komponen cadangan tentu akan menambah daya gempur komponen utama di medan perang nantinya.

Selain komponen cadangan terdapat juga komponen pendukung yang berisikan baik itu personel, infrastruktur, hingga sumber daya alam

harus sepenuhnya dapat mendukung jalannya perjuangan Indonesia apabila ikut terlibat dalam konflik terbuka di Laut Tiongkok Selatan. Tetapi saat ini komponen pendukung untuk membantu komponen cadangan dan komponen utama dalam melaksanakan operasinya tidak sepenuhnya terbentuk. Banyak infrastruktur dan sumber daya alam belum secara efektif digunakan untuk membangun pertahanan Indonesia. sumber daya manusia juga belum sepenuhnya dapat diberdayakan untuk ikut dalam pembangunan postur pertahanan bangsa. Padahal komponen pendukung berisi aspek-aspek vital pendukung jalan nya peperangan. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengorganisir komponen pendukung sehingga suatu waktu tidak hanya komponen utama dan komponen cadangan saja yang siap dimobilisasi tetapi juga komponen pendukung siap untuk ikut dimobilisasi dalam membantu jalannya peperangan. Apabila tidak dapat dilakukan maka strategi perang semesta yang coba dijalankan oleh Indonesia akan sia-sia.

Rekomendasi terakhir yang dapat penulis berikan adalah Indonesia sudah saatnya melakukan investasi mahal untuk melakukan riset dan pembangunan

peralatan senjata sendiri. Dengan kuatnya kebijakan politik bebas aktif tidak memihak atau melakukan aliansi dengan negara manapun, Indonesia perlu melakukan pengembangan riset persenjataan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketergantungan senjata yang berasal dari luar. Kondisi saat ini sesungguhnya kurang menguntungkan untuk terus bergantung pada beberapa produsen tanpa menjadi bagian aliansi salah satu produsen senjata tersebut. Negara-negara yang menjadi aliansi tentu akan mendapatkan akses lebih pada persenjataan tersebut sementara Indonesia tidak banyak yang didapat walaupun terus bermunculan wacana transfer teknologi. Sudah tentu Indonesia mengeluarkan jumlah dana yang besar untuk membeli peralatan senjata dari luar. Dan memang akan memerlukan dana yang jauh lebih besar lagi untuk pengembangan industri strategis di dalam negeri. Tetapi investasi tersebut bukan berarti percuma. Agar mendukung kebijakan politik bebas aktif secara terus menerus sekaligus menciptakan Indonesia yang mandiri pada teknologi persenjataan maka investasi pada industri strategis harus dapat berjalan secepatnya. Dan suatu fakta yang

menarik pada negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris. Pada riset pengembangan persenjataan, banyak yang dapat dihasilkan dari industri tersebut. Ternyata industri strategis tidak hanya menghasilkan persenjataan saja tetapi juga peralatan untuk membantu kegiatan sipil seperti satelit yang awalnya hanya untuk keperluan militer ternyata dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat sipil untuk berkomunikasi.

Walaupun saat ini Indonesia mengedepankan diplomasi, tetapi militer tetap harus memberikan dukungan dibelakangnya. Dengan menunjukkan postur TNI yang kuat, maka diplomasi tidak hanya dalam bentuk dialog yang dapat dilakukan tetapi juga dalam bentuk diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan ini dapat dilakukan dengan menunjukkan kekuatan TNI Indonesia pada negara-negara lain dengan melakukan latihan bersama ataupun pada pameran persenjataan internasional. Dengan kondisi saat ini, selama CoC belum terbentuk dan tanpa adanya kesepakatan dengan Tiongkok maka potensi pecahnya konflik di Laut Tiongkok Selatan akan tetap ada dan bukan tidak mungkin akan mendorong Indonesia masuk ke dalam konflik tersebut karena posisi geografisnya. Dengan dasar tersebut

maka baik strategi diplomasi maupun strategi militer harus tetap berjalan dalam upaya mencegah konflik terbuka yang merupakan ancaman tradisional bagi Indonesia yang dapat mengganggu keutuhan wilayah kedaulatan Indonesia.

### **Penutup**

Analisa yang dilakukan di atas merupakan skenario terburuk yang dapat terjadi terhadap Indonesia. Walaupun terdapat kesan analisa ini merupakan *securitysation* pada sengketa Laut Tiongkok Selatan tetapi ancaman ini dapat bersifat nyata melihat kecenderungan yang terjadi belakangan ini. Saat ini, Indonesia tengah mengedepankan upaya diplomasi sebagai jalan utama untuk mencegah konflik di Laut Tiongkok Selatan. Tetapi bukan berarti walau mengedepankan diplomasi peran militer kemudian menjadi nihil dalam memantau perkembangan di wilayah sengketa. Pada masa damai seperti ini, kesiapsiagaan TNI menjadi faktor kunci dalam mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk bagi Indonesia. Tidak boleh dilupakan juga postur TNI berpengaruh terhadap situasi yang ada di wilayah sengketa saat ini. Dengan memiliki postur yang kuat, Indonesia dapat menciptakan *deterrence effect* bagi Tiongkok agar tidak memasuki

ataupun mengklaim wilayah yuridiksi Indonesia. Selain itu dengan postur yang kuat maka akan tercipta *balance of power* di kawasan untuk meredam perilaku agresif Tiongkok terhadap negara-negara ASEAN lainnya yang sedang berkonflik saat ini dengan Tiongkok. Di belahan bumi manapun, dengan memiliki postur militer yang kuat bukan berarti negara tersebut bersiap untuk melakukan agresi, tetapi postur yang kuat dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya tawar suatu negara dalam kancah internasional. Dan tentu daya tawar yang kuat ini akan mempermudah suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional demi bangsanya sendiri.

### Daftar Pustaka

#### Buku dan Jurnal

- Clausewitz, Carl Von. 1987. *On War*, Ed by Michael Howard and Peter Paret. Princeton University Press.
- Information Office of the State Council of The People's Republic of China. 2006. Beijing. *National Defense Paper 2006*.
- Ojong, P.K. 2005. *Perang Eropa Jilid 1*, Kompas Gramedia. Jakarta.
- Sorensen , Robert Jackson &. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford Univesity Press, Inc.
- Thayer, Carlyle A.. *Indonesia's Efforts to Forge ASEAN Unity on Code of Conduct*. Center for Strategic International Studies. 2013.
- The Military Balance 2011, chapter six : Asia*. 2011.
- Vasquez, John and Henehan, Marie T. 2011. *Territory, War, and Peace*. Oxon: Routledge.
- Viotti, Paul R. And Kauppi, Mark V. 1999. *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. MA : Allyn & Bacon.

#### Website

- Beina Xu. (2014, May). South China Sea Tension. *Council on Foreign Relations*. Available : <http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790>.
- Alexander R. Vulving, *Vietnam, US, and Japan in South China Sea*, *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2014/11/vietnam-the-us-and-japan-in-the-south-china-sea/>, diakses 29 Desember 2014.
- US to Partially Lift Vietnam Arms Embargo, *BBC News Us& Canada*, <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-29469719>, diakses 29 Desember 2014.
- Carl Thayer, *Vietnam Mulling New Strategy to Deter China*, *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2014/05/vietnam-mulling-new-strategies-to-deter-china>, diakses 29 Desember 2014.
- The Obama Administration Pivot to Asia*, *The Foreign Policy Initiative*, <http://www.foreignpolicyi.org/content/obama-administrations-pivot-asia>, diakses 29 Desember 2014.
- Adelle Neary, *Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus"*, *CSIS*, <http://csis.org/publication/jokowi-spells-out-vision-indonesias-global-maritime-nexus>, diakses 29 Desember 2014.
- Jim Wolf, *US Moves to Arms Indonesia's Growing F-16 Fighter Fleet*, *Reuters*, <http://www.reuters.com/article/2012>

- [/08/25/usa-indonesia-arms-idUSL2E8JOGMO20120825](#), diakses 29 Desember 2014.
- Masykur A. Baddal, *Masuknya Wilayah Natuna Dalam Paspor Baru China, Proyek China Raya Semakin Dekat?*, Kompasiana, <http://hankam.kompasiana.com/2014/10/16/masuknya-wilayah-natuna-dalam-paspor-terbaru-china-proyek-china-raya-semakin-dekat-680832.html>, diakses 29 Desember 2014.
- Evy R. Syamsir, *China Klaim Wilayah Natuna*, Antara News, <http://www.antaranews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna>, diakses 28 Desember 2014.
- Lanud Hasanuddin, *Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara*, <http://tni-au.mil.id/content/lanud-hasanuddin-o>, diakses 29 Desember 2014.
- TNI AU Lanud Supadio, *Skadron Udara 1*, <http://lanud-supadio.mil.id/divisi/skadron-udara-1/>, diakses 28 Desember 2014.
- F.B. Anggoro, *Skadron Udara Baru F-16 Blok 25 di Pekanbaru Operasional Juni*, Antara News, <http://www.antaranews.com/berita/421130/skadron-udara-baru-f-16-blok-25-di-pekanbaru-operasional-juni>, diakses 28 Desember 2014.
- Koarmabar TNI AL, <http://koarmabar.tnial.mil.id/>, diakses 29 Desember 2014.
- Patroli Armatim Terkendala Pasokan BBM*, Sinar Harapan.CO, <http://sinarharapan.co/news/read/141217002/patroli-armatim-terkendala-pasokan-bbm>, diakses 29 Desember 2014.
- The Diplomat, *China's Real Blue Water Navy*, <http://thediplomat.com/2011/08/30/chinas-not-so-scary-navy/comment-page-2/?all=true>, diakses 29 Desember 2014.
- CNN, *China Lands First Jet on Aircraft Carrier*, <http://edition.cnn.com/2011/11/25/world/asia/china-aircraft-carrier-landing/>, diakses 29 Desember 2014.
- Dan Parsons, *South China Sea Dispute Shaping Up as Coast Guard Showdown*, National Defense Magazine, <http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2014/June/Pages/SouthChinaSeaDisputeShapingUpasCoastGuardShowdown.aspx>, diakses 29 Desember 2014.
- Pencegatan Pesawat Pernah Terjadi di Makassar dan Bawean*, Tempo Politik, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/08/078375941/Pencegatan-Pesawat-Pernah-Terjadi-di-Makassar-dan-Bawean>, diakses 29 Desember 2014.
- Chronological List of Ratifications, Accessions and Successions to the Convention and the Related Agreement as at 3 October 2014*, Oceans and Law of The Sea United Nations, [http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm), diakses 29 Desember 2014.

#### **Koran**

100 Tahun Perang Dunia Pertama, Kompas 10 Agustus 2014.